



**PUTUSAN**

Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK xxx, umur 27 tahun (Balikpapan, 11 Januari 1996) Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.  
melawan

**A.Fatawari bin A. Makka**, xxxxx1 umur 32 tahun (Sinjai, 30 Agustus 1991) Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TK2D, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 30 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 400/27/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik*;
  1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxx xxxx, xx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
  2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afifa Fara Fahmina binti A. Fatwari NIK 6408046605230002, lahir di Kutai Timur pada tanggal 26 Mei 2023 (dalam asuhan Penggugat);
  3. Bahwa, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya bertahan selama 1 (satu) bulan, yang di sebabkan:
    - a. Bahwa Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat dengan cara di pukul di tampar dan di tendang hingga memar;
    - b. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah wajib berupa uang sehingga yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;
  4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2023 dengan permasalahan sama kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
  5. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 2 (dua) hari antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat (**A. Fatawari bin A. Makka**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** dengan NIK xxx4 tertanggal 30 November 2023, bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 17 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta



**B. Saksi:**

1. **saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 45, No. 129, Desa xxxxxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama A. Fatawari;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keributan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan menyalahkan Penggugat;
- Bahwa istri saksi pernah ribut dengan Tergugat karena membela Penggugat saat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setiap bertengkar Penggugat pulang kerumah saksi dalam keadaan menangis
- Bahwa sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Norma;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **saksi 2** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 45, No. 129, Desa xxxxxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sempat terlibat pertengkaran dengan Tergugat disebabkan Tergugat membentak Penggugat;
- Bahwa masalah yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menyalahkan Penggugat dan pernah tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sehingga saksi sempat emosi;
- Bahwa setiap bertengkar Penggugat pulang kerumah saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Norma;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dengan susunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah karena 1 (satu) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat dengan cara di pukul di tampar dan di tendang hingga memar dan Tergugat jarang memberi nafkah wajib berupa uang sehingga yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dan dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 November 2023 hingga sekarang;

## Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekat dari Penggugat sebagaimana Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah di-*nazegeleen* dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) tersebut maka Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) ternyata saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(xxx)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum bahwa setelah 3 (tiga) bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian diikuti dengan adanya fakta hukum pisah tempat tinggal atau sekitar 1 (satu) bulan lamanya merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri dan pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan demikian pula dimuka persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Hakim dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka Hakim mengambil kesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim tidak lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah dan/atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim telah mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini tetap dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan tidak hanya bagi Penggugat namun juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diperoleh maslahat bagi keduanya daripada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nadzair* Juz I, halaman 145 yang berbunyi sebagai berikut :

رَأُ الْمَقَاسِدِ أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa *relevan* pula dengan perkara ini Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut diatas dan dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka pasangan suami istri tidak boleh memberi mudharat kepada satu sama lainnya, salah satunya dengan cara berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang dapat dibenarkan, karena perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta





Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, Hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas maka Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan Penggugat tersebut harus diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab *Luzumil ljabah liman du'ya ilal hakim* sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Pasuruan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Sangatta, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun Penggugat berada dalam masa iddah (vide Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

## MENGADILI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**A. Fatawari bin A. Makka**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizal Habibunnajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

**Ismail, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Rahman Sidik, S.H.**

## Perincian Biaya :

1	PNBP	:	Rp	70.000,00,-
2	Proses	:	Rp	50.000,00,-
3	Panggilan	:	Rp	82.000,00,-
4	Meterai	:	Rp	10.000,00,-

**Jumlah : Rp 212.000,00,-**  
**(dua ratus dua belas ribu rupiah)**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Sgta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)